PENGARUH ALOKASI DANA PERIMBANGAN DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

(Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
pada Jurusan Akuntansi

OLEH :

SELVIA AYU DYAH WAHYUNITA

NPM. 11.1.02.01.0161

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NUSANTARA PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA

UN PGRI KEDIRI

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi Oleh:

SELVIA AYU DYAH WAHYUNITA

NPM. 11.1.02.01.0161

Judul:

PENGARUH ALOKASI DANA PERIMBANGAN DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

(Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur)

Telah disetujui untuk diajukan Kepada
Panitia Ujian/Sidang Skripsi Jurusan Akuntansi
FE UN PGRI Kediri

Tanggal: 28 Desember 2015

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Drs. Ec. Ichsannudin, M.M	Sigit Puji Winarko, S.E, S.Pd, M.Ak
NIDN. 0723105703	NIDN.0716057101

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Oleh:

SELVIA AYU DYAH WAHYUNITA

NPM. 11.1.02.01.0161

Judul:

PENGARUH ALOKASI DANA PERIMBANGAN DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur)

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian/Sidang Skripsi
Jurusan Akuntansi FE UN PGRI Kediri
Pada Tanggal: 5 Januari 2016

Dinyatakan telah Memenuhi Persyaratan

Panitia Penguji:

1. Ketua : Drs. Ec. Ichsannudin, M.M
2. Penguji I : Drs. Ec. Sugeng, M.M, M.Ak
3. Penguji II : Sigit Puji Winarko, S.E, S.Pd, M.Ak

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. Subagyo, M.M
NIDN.0717066601

PENGARUH ALOKASI DANA PERIMBANGAN DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

(Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur)

SELVIA AYU DYAH WAHYUNITA
11.1.02.01.0161
EKONOMI - AKUNTANSI
selviasusanto22@gmail.com
DRS. Ec. ICHSANNUDIN, M.M DAN SIGIT PUJI WINARKO, S.E, S.Pd, M.Ak
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penyebab keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Alokasi Dana Perimbangan Daerah dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Pertumbuhan Ekonomi merupakan variabel terikat dalam penelitian ini. Sedangkan variabel bebasnya adalah Alokasi Dana Perimbangan Daerah dan Belanja Modal.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, dengan model regresi linier berganda dan tingkat kepercayaan 5%. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari situs resmi DJPK dan BPS Jatim. Penelitian ini menggunakan populasi seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama lima tahun yaitu tahun 2009 sampai dengan 2013 yang berjumlah 38 kabupaten/kota. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *probability sampling* dengan teknik *simple random sampling* yang kemudian didapatkan 10 sampel kabupaten/kota.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi dana perimbangan daerah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan belanja modal mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil uji F diketahui bahwa variabel alokasi dana perimbangan daerah dan belanja modal secara simultan mempunyai pengaruh yang siginifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil *R Square* mendapatkan nilai sebesar 0,543 atau 54,3% yang menunjukkan bahwa besarnya pengaruh alokasi dana perimbangan daerah dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 54,3%. Sedangkan sisanya sebesar 45,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci: pertumbuhan ekonomi, dana perimbangan daerah, belanja modal

I. LATAR BELAKANG

"Pembangunan merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik dalam lingkungan masyarakat (Nasution, 2007)". Oleh karena itu, berbagai kegiatan pembangunan daerah diarahkan kepada pembangunan yang merata ke setiap bagian dari daerah tersebut, khususnya daerah yang cenderung masih memiliki kelemahan dalam penerimaan pendapatannya.

Salah satu asas pembangunan daerah adalah desentralisasi. Perwujudan adanya kebijakan desentralisasi tersebut dapat dilakukan melalui otonomi daerah. Otonomi daerah yang berlaku di Indonesia didasarkan pada UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah. Kedua undang-undang tersebut menjadi dasar pelaksanaan desentralisasi secara nyata di Indonesia pada Januari 2001. Kemudian undang-undang tersebut diamandemen menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 yang menjadi salah satu poin penting dalam perjalanan kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia.

Dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan. Dana perimbangan adalah salah satu sumber pendanaan dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan adanya pengalokasian dana perimbangan, diharapkan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, karena dana ini cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada publik.

Faktor penentu pentingnya pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah pengeluaran pemerintah. Namun, pertumbuhan ekonomi tergantung pada ukuran, kapasitas belanja dan keefektifan penggunaan belanja modal dalam proses pembangunan. Pembangunan ekonomi ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan perkapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Kenyataan yang terjadi dalam pemerintah daerah saat ini adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan peningkatan belanja modal, hal tersebut dapat dilihat dari kecilnya jumlah belanja modal yang dianggarkan dengan total anggaran belanja daerah.

Salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian daerah adalah dengan mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui perbaikan sektor-sektor yang dianggap produktif, terutama sektor publik. Peningkatan pembangunan infrastruktur di sektor publik dipandang perlu dilakukan, karena hal tersebut akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah.

"Pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan *output* yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan (Sukirno dalam Nelly dalam Permana, 2013)".

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah harus mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan baik dan juga mengoptimalkan pelayanan kepada publik. Dengan adanya peningkatan, penambahan dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan, seiring dengan meningkatnya pendapatan asli daerah. Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas ini akan berujung pada peningkatan kemandirian daerah.

Untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka perlu diketahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti dana perimbangan dan belanja modal. Atas dasar itulah maka penulis memilih judul **"PENGARUH ALOKASI DANA PERIMBANGAN DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur)".**

II. METODE

Berdasarkan data pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2009-2013, diketahui total populasi data adalah sebanyak 38 kabupaten/kota, yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota.

Dalam penelitian ini sampel yang diambil menggunakan metode *probability sampling* (pengambilan sample secara acak) dengan teknik *simple random sampling*. "*Simple random sampling* adalah teknik pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2013:120)". Cara pengambilan sampel dengan *random* ada tiga cara, yaitu (Sugiyono, 2013:120):

a. Undian (digoncang seperti arisan), adalah pengambilan sampel dengan cara memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk menjadi anggota sampel.
b. Ordinal (angka kelipatan), adalah cara pengambilan sampel dengan kelipatan dua, kelipatan tiga dan seterusnya.
c. Randomisasi, adalah pengambilan sampling melalui tabel bilangan random.

Berdasarkan kriteria tersebut, penulis memilih metode undian dan mendapatkan 10 sampel yang terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota selama kurun waktu lima tahun (2009-2013). Jadi jumlah anggota sampel yang diteliti dalam penelitian ini adalah 10 x 5 = 50 data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teknik Dokumentasi

Yaitu di mana data yang diambil penulis berasal dari sumber data sekunder dengan mengumpulkan, mencatat dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan jalan menyalin dan mengutip obyek penelitian, menggali informasi kepustakaan atau hasil penelitian lain termasuk hasil penelitian terdahulu sebagai sumber yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dan bersifat teoritis.

A. Jenis Analisis

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah terdistribusi secara normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu:

1.) Analisis Grafik

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram. (Ghozali, 2011:160-211).

Selain itu, analisis grafik dapat dilakukan dengan melihat grafik *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal.

2.) Analisis Statistik

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non parametrik *Kolmogorov-Smirnov (K-S)*.

b. Uji Autokorelasi

"Tujuannya adalah untuk menguji apakah dalam metode regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelum) (Ghozali, 2011:110)".

Untuk mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan uji statistik *Durbin-Watson (DW test)* dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05.

c. Uji Multikolinearitas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel independen. Selain itu juga bertujuan untuk menghindari bias dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari *tolerance value* dan nilai *Variance Inflation Faktor (VIF)*.

d. Uji Heteroskedastisitas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas adalah dengan melihat pada grafik *scatterplot*.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Bertujuan untuk memprediksi kekuatan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun model regresi linier berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini dapat digambarkan dengan persamaan: $Y = \alpha + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + e$

3. Pengujian Hipotesis

a. Pengujian Parsial (Uji t)

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara signifikan.

b. Pengujian Simultan (Uji F)

Tujuannya adalah untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel terikat.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur proporsi atau persentase sumbangan variabel bebas yang akan diteliti terhadap variasi naik turunnya variabel terikat. Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol sampai dengan satu ($0 \leq R^2 \leq 1$).

III. HASIL DAN KESIMPULAN

A. HASIL

1. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

1.) Analisis Grafik

Berdasarkan hasil uji SPSS dimana grafik histogram memberikan pola distribusi yang puncak kurvanya berada tepat pada titik nol dan membagi atau mempunyai sisi yang sama, tidak menceng ke kiri dan ke kanan, yang artinya adalah data berdistribusi normal.

Sedangkan berdasarkan hasil uji SPSS dimana grafik *normal probability plot* menunjukkan bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, menunjukan pola distribusi normal.

Berdasarkan kedua grafik tersebut dapat dilihat bahwa data telah berdistribusi normal.

2.) Analisis Statistik

Berdasarkan hasil uji SPSS, nilai signifikan kedua variabel tersebut sebesar 0,175 yang lebih besar dari taraf signifikan 0,05. Maka menunjukan bahwa data terdistribusi normal

b. Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil uji SPSS, nilai uji *Durbin Watson* (*DW test*) sebesar 2,022 dan batas atas (du) sebesar 1,628. Sehingga 4 – du = 4 – 1,628 = 2,372. Pengambilan keputusan tidak adanya autokorelasi jika nilai du < d < 4 – du. Dengan demikian 1,628 < 2,022 < 2,372, sehingga dapat dinyatakan bahwa pada persamaan regresi tersebut tidak terdapat gejala autokorelasi.

c. Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil uji SPSS dapat diketahui bahwa kedua variabel

memiliki *tolerance value* > 0,1 dan nilai VIF < 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas.

d. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji SPSS yang ditujukkan oleh grafik *scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tidak menujukkan pola tertentu, tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada penelitian ini.

2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil uji SPSS, maka didapatkan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: $Y = 3,370 + 0,004x_1 - 0,002x_2 + e$

Persamaan tersebut mempunyai makna bahwa:

a. $\alpha = 3,370$: artinya apabila alokasi dana perimbangan daerah (x_1) dan belanja modal (x_2) diasumsikan sama dengan 0 maka pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 3,370.

b. $\beta_1 = 0,004$: artinya apabila alokasi dana perimbangan daerah (x_1) naik 1 (satu) satuan dan belanja modal (x_2) tetap maka pertumbuhan ekonomi akan naik sebesar 0,004.

c. $\beta_2 = -0,002$: artinya apabila belanja modal (x_2) naik 1 (satu) satuan dan alokasi dana perimbangan daerah (x_1) tetap maka pertumbuhan ekonomi akan turun sebesar 0,002.

3. Pengujian Hipotesis

a. Pengujian Parsial (Uji t)

Berdasarkan hasil uji SPSS diperoleh hasil sebagai berikut:

1.) Untuk Alokasi Dana Perimbangan Daerah (x_1)

Nilai $t_{hitung} = 6,635 > t_{tabel} = 2,012$ atau nilai sig. = 0,000 < 0,05 → maka H_1 diterima, artinya alokasi dana perimbangan daerah

(x_1) secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y).

2.) Untuk Belanja Modal (x_2)

Nilai t_{hitung} = -3,498 > t_{tabel} = 2,012 atau nilai sig. = 0,001 < 0,05 → maka H_1 diterima, artinya Belanja Modal (x_2) secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y).

b. Pengujian Simultan (Uji F)

Berdasarkan hasil uji SPSS diketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar 27,869 dan nilai sig. sebesar 0,000 dengan taraf signifikansi 5%. Maka F_{hitung} = 27,869 > F_{tabel} (2,47) = 3,20 atau nilai sig. = 0,000 < 0,05 → H_1 diterima. Pengujian ini menunjukkan bahwa alokasi dana perimbangan daerah (x_1) dan belanja modal (x_2) secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y).

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Dari hasil uji SPSS diketahui nilai *R Square* = 0,543 yang menunjukkan bahwa besarnya pengaruh alokasi dana perimbangan daerah (x_1) dan belanja modal (x_2) terhadap pertumbuhan ekonomi (y) adalah sebesar 54,3%. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada pengaruh variabel lain sebesar 45,7% yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tetapi tidak diteliti dalam penelitian ini.

B. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh antara alokasi dana perimbangan daerah dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi pada pemerintah kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial, alokasi dana perimbangan daerah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada pemerintah kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur.
2. Secara parsial, belanja modal mempunyai pengaruh yang negatif dan signifkan terhadap pertumbuhan ekonomi pada pemerintah kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur.
3. Alokasi dana perimbangan daerah dan belanja modal secara simultan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada pemerintah kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (www.jatim.bps.go.id). Data Laporan PDRB Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur. Diakses pada 18 Juni dan 22 September 2015.

Budiono. 1994. *Teori Pertumbuhan Ekonomi Edisi 1*. Jogjakarta: BPFE.

Butar, Stepanus Jacson Butar. 2012. *Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat*. Jurnal Ilmiah. Dipublikasikan. Pontianak: Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan. (www.djpk.depkeu.go.id). Data Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Diakses pada 29 Maret dan 20 Juni 2015.

Ghozali. Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: BP Universitas Diponegoro.

Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.

Iskandar, Maolana Amin. 2012. *Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Kemandirian Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah pada Pemerinntah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa*. Skripsi. Dipublikasikan. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

Jogiyanto. 2012. *Metodologi Penelitian Baru*. Jogjakarta: BPFE.

Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) No. 29 Tahun 2002 tentang *Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.

Makruf, Dikko Alrakhman. 2009. *Public Administration*. Skripsi. Dipublikasikan. Jakarta: Universitas Indonesia.

Munawar. 2006. *Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran terhadap Perilaku*

Sikap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Di Kabupaten Kupang. Makalah disajikan dalam Simposium Nasional Akuntansi X Makasar. Makasar. 23-26 Agustus 2006.

Nasution, Zulkarimen. 2007. *Komunikasi Pembangunan (Pengenalan Teori dan Penerapannya)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Nordiawan, Dedi. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 Pasal 22 Ayat (1) dan Pasal 53Ayat (1) tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.02 Tahun 2011 tentang *Klasifikasi Anggaran.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2004 tentang *Dana Perimbangan*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Permana, Deva Yoga. 2013. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Skripsi. Dipublikasikan. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Permanasari, Windha Amiga. 2013. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2011)*. Artikel. Dipublikasikan. Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah.

Prakarsa, Febrian Dwi. 2014. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus di Kabupaten/Kota Jawa Timur tahun 2008-2012)*. Jurnal Ilmiah. Dipublikasikan. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sukmadinata, Prof. Dr. Nana Syaodih. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2007 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.*

Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (19) tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Widjaja, Prof. Drs. HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.